

PERAN IMUM MUKIM DALAM PEMBANGUNAN PEMERINTAHAN GAMPONG DI ACEH

Mudfar Alianur, Aidil Syah Putra
Institut Agama Islam Negeri Takengon
Email : ufar13@yahoo.co.id

ABSTRAK

Lembaga Mukim lembaga resmi Pemerintah berada di bawah Camat dipimpin oleh seorang Imum Mukim. Imum Mukim memiliki fungsi dan kewenangan berdasarkan Qanun Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Mukim. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dan kewenangan Imum Mukim serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintahan gampong di Aceh. Metode penelitian menggunakan penelitian kepustakaan dan lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lembaga Mukim sangat berperan baik dalam pembangunan Pemerintahan Gampong. Hambatannya yaitu kurang pemahannya masyarakat terhadap pentingnya akan tugas dan kewenangan Imum Mukim dalam pembangunan Pemerintahan Gampong.

Kata Kunci : Imum Mukim, Pembangunan Pemerintahan Gampong

ABSTRACT

The Mukim Institution, the official government institution, is under the Camat led by an Imum Mukim. Imum Mukim has functions and authorities based on Qanun Number 4 of 2003 concerning Mukim Government. The research objective was to determine the role and authority of the Imum Mukim and the obstacles in the implementation of village governance development in Aceh. The research method uses literature and field research. The results showed that the Mukim institution was very good at developing Gampong Government. The obstacle is the lack of public understanding of the importance of the duties and authorities of the Imum Mukim in the development of the Gampong Government.

Keywords : Imum Mukim, Gampong Government Development.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Catatan sejarah, menurut Harley bahwa Pemerintahan mukim telah lahir di Aceh sejak beberapa abad silam. Pertama sekali, Pemerintah Mukim ini dicetuskan pada dinasti Sultan Iskandar Muda, itulah awal kelahiran Pemerintahan mukim di Aceh. Mukim dulunya dikala Aceh masih dijajah Belanda sangat bagus fungsinya dan mempunyai peran yang jelas dalam menata Pemerintahan mukim. Meski kala itu Belanda yang menguasai Aceh, namun para penjajah tak ikut campur dalam urusan Pemerintahan mukim.¹

Kedudukan Mukim secara struktural dan fungsinya masih masa seperti masa kemerdekaan. Namun mukim mulai dimarjinerkan ketika Pemerintahan mengeluarkan Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa, yang mengeragamkan segala lini struktural Pemerintahan, sehingga saat itulah mukim dibekukan dari peran dan fungsinya. Peran Imum Mukim sekarang ini bukan hanya sebatas mengurus permasalahan antar gampong, tapal batas, persoalan pemuda tetapi lebih dari itu. Imum Mukim harus mampu menyelesaikan persoalan adat, budaya serta masalah yang berhubungan dengan agama. Imum Mukim harus didukung penuh oleh masyarakat agar semua programnya berjalan sukses, karena sehebat apapun seorang pemimpin kalau tidak di dukung oleh masyarakat pasti tidak akan berhasil.

Selama ini peran Imum Mukim memang dirasakan belum maksimal. Sanusi M. Syarif Sanusi menjelaskan bahwa dalam hal pengelolaan Pemerintahan Gampong dalam susunan Pemerintahan Aceh dahulu gampong merupakan tingkat pemerintahan paling bawah dan memiliki hak otonomi yang disebut pemerintahan gampong. Sebagai wilayah otonomi paling bawah, gampong adalah sebuah daerah hukum

¹Harley, 2008, Mukim Masa ke Masa Aceh : Jaringan Komunikasi Masyarakat Adat (JKMA), Aceh, hlm. 23.

yang diakui oleh kerajaan. Kedudukan gampong dalam pemerintahan kerajaan Aceh saat itu dapat disamakan dengan desa di Jawa, dusun di Sumatera Selatan, atau Huta di Batak dan kampung daerah-daerah Melayu.²

Di dalam Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong. Didalam qanun tersebut yang dimaksud dengan gampong adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang merupakan organisasi pemerintahan terendah di bawah Mukim yang menempati wilayah tertentu dan dipimpin oleh seorang geuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri. Geuchik sebagai pimpinan gampong adalah kepala badan eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong dan dibantu oleh badan permusyawaratan gampong yang disebut Tuha Peut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari beberapa pemikiran di atas, maka kajian ini akan mengambil beberapa pokok permasalahan antara lain :

1. Bagaimana Peran Imum Mukim dalam pembangunan Pemerintahan gampong di Aceh?
2. Apa sajakah hambatan-hambatan yang dihadapi Imum Mukim dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintahan gampong di Aceh ?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan teknik penelitian adalah kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terperinci dari pandangan responden dan

² Sanusi M Syarif, 2009. *Gampong dan Mukim di Aceh : Menuju Rekonstruksi Paska Tsunami*, Pustaka Rumpun Bambu, hlm. 27.

melakukan studi pada situasi yang alami.³ Dalam penelitian ini, yang menjadi populasinya adalah masyarakat Kecamatan yang ada di Aceh.⁴ Adapun Sampel yaitu bagian dari populasi yang menjadi objek penelitian. Sampel dari pihak-pihak yang terkait secara langsung, maupun tidak langsung, dengan Imum Mukim di Aceh, yaitu :

1. Imum Mukim Aceh Besar, Sigli, Bireun, Aceh Tengah.
2. Masyarakat Aceh yang dipilih sebanyak 20 orang, yaitu 5 dari masyarakat Aceh Besar, 5 dari masyarakat Sigli, 5 dari masyarakat Bireun dan 5 dari masyarakat Aceh Tengah

Cara pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan sistem purposive sampling. Pengambilan *purposive sampling* dilakukan berdasarkan pertimbangan perorangan atau pertimbangan peneliti. Sampel dengan cara ini diambil berdasarkan data yang akurat. Cara pengumpulan data dilakukan wawancara untuk memperoleh data primer dan metode kuisisioner (angket). Analisis data adalah proses menyeleksi, menyederhanakan, memfokuskan, mengabstraksikan dan mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional sesuai dengan tujuan penelitian serta mendiskripsikan data hasil penelitian itu dengan menggunakan tabel sebagai alat bantu untuk memudahkan dalam menginterpretasikan.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peran Imum Mukim dalam pembangunan Pemerintahan gampong di Aceh

Gampong dalam susunan pemerintahan Aceh dahulu merupakan tingkat pemerintahan paling bawah dan memiliki hak otonomi yang disebut pemerintahan gampong. Sebagai wilayah otonomi paling bawah, gampong adalah sebuah daerah hukum yang diakui oleh kerajaan. Mengenai

³ Jhon W. Creswell, 1998. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Traditions*. Los Angeles: Sage Publications, hlm. 15.

⁴ Hendrawan Sakti, 2011. *Koki Skripsi : Resep Cepleng Bikin Skripsi 29 hari ; Araska, Bantul Yogyakarta*, hlm. 49.

pengaturan gampong pemerintah Aceh sudah menetapkan qanum sendiri yaitu qanum nomor 5 tahun 2003. Dalam qanun tersebut yang dimaksud dengan gampong adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang merupakan organisasi pemerintah terendah dibawah mukim yang menempati wilayah tertentu dan dipimpin oleh seorang Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri. Keuchik sebagai pimpinan gampong adalah kepala badan eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintah gampong dan dibantu oleh Badan Permusyawaratan Gampong yang disebut Tuha Peut.

Pemerintahan gampong merupakan struktur terendah dalam sistem pemerintahan di Aceh. Dalam pelaksanaannya sehari-hari pemerintahan gampong dipimpin oleh seorang Keuchik dan dibantu oleh Sekretaris Desa (sekdes) yang diangkat dari unsur Pegawai Negeri Sipil. Pembangunan pemerintahan gampong yaitu suatu proses perubahan kearah yang lebih baik dalam hal pengelolaan pemerintahan maupun tingkat pelayanan masyarakat yang lebih baik dari sebelumnya.

Penandatanganan memorandum of understanding (MUO) di Helsinki, Finlandia pada 15 Agustus 2005, merupakan babak baru bagi keberlangsungan hidup di Aceh. Karena hampir 3 dekade Aceh dilanda konflik berkepanjangan. Selama konflik berlangsung, upaya untuk membangun gampong di Aceh tidak berjalan dengan baik. Meski disadari bahwa banyak program pembangunan telah dilaksanakan pada waktu, hasil yang dicapai tidak optimal, sehingga Aceh saat itu smakin hari semakin jauh.

Tsunami 26 Desember 2004 melanda, ini karena kejadian tersebut menyebabkan sebahagian besar gampong-gampong di Aceh umumnya dan Dikecamatan Teunom khususnya mengalami kerusakan parah. Upaya menata dan membangun kembali gampong-gampong secara sistematis di Kecamatan dilakukan pasca tsunami, dimaksudkan agar gampong-gampong yang ada di Aceh sejajar dengan kemajuan dari gampong didaerah lain. Pasca tsunami banyak dana mengalir ke bumi Aceh, baik dana pemerintah, swasta, maupun

dari donor luar negeri.

Adapun yang menjadi peran imum mukim dalam pembangunan pemerintahan di Aceh yang dilihat di lingkungan masyarakat yaitu diantaranya :

1. Kewenangan dalam mengontrol Pembangunan di gampong

Imum mukim merupakan bagian dari pemerintah mereka memiliki tugas dan kewenangannya sendiri dalam mengontrol pelaksanaan pembangunan terutama ditingkat gampong. Meski masih banyak kendala dan keterbatasan dilapangan namun Imum Mukim tetap harus memainkan perannya dalam pelaksanaan pembangunan baik yang berkaitan dengan pemerintahan, adat istiadat, sosial politik, ekonomi dan budaya ditingkat gampong di Aceh. Dampak yang dirasakan oleh masyarakat di Aceh pun nyata adanya, sebab banyak pekerjaan dalam bentuk fisik maupun non fisik yang terlaksana ditingkat gampong. Banyak jalan yang sebelumnya rusak, sekarang sudah diperbaiki atau pembangunan fisik lainnya yang sebelumnya tidk ada, sekarang sudah dibangun dengan baik, namun dalam hal ini harus diakui bahwa adanya perubahan kearah yang lebih baik (pembangunan) dalam hal penyelenggaraan pemerintahan gampong di Aceh. Namun demikian tentu masih banyak kekurangan dan kelemahan disana sini yang masih perlu diperbaiki terutama dalam hal pelayanan administratif maupun pelayanan pendataan. Hal ini semua disebabkan kurangnya sumber daya manusia yang menjalankan roda pemerintahan ditingkat gampong.⁵

Keterlibatan dalam Pembangunan Pemerintahan di gampong, Imum Mukim sangat berperan dalam membantu pemerintah daerah menyelesaikan masalah-masalah sosial masyarakat baik berupa konflik atau representasi ditingkat gampong. Selain itu Imum Mukim juga dapat berperan sebagai representasi masyarakat dalam pelaksanaan

⁵ Muhammad Bahri, Imum Mukim Sigli, *Wawancara*, Tanggal 10 April 2018.

pembangunan yang dilakukan pemerintah di gampong. Oleh karena itu sangatlah penting keterlibatan Imum Mukim dalam proses pelaksanaan program-program ditingkat Pemerintah Kecamatan maupun Daerah. Meskipun tidak semua kegiatan yang dilakukan Pemerintah Daerah tidak melibatkan peran Imam Mukim, yang seharusnya perlu dan penting keterlibatan Imum Mukim dalam pembangua gampong.⁶

2. Koordinaasi dan Hubungan dalam Pembangunan di gampong

Lembaga mukim merupakan lembaga resmi pemerintah yang berkedudukan langsung dibawah camat, meski lembaga mukim sudah cukup dikenal dikalangan masyarakat namun tidak semua orang mengerti dan mengetahui tugas kewenangan Mukim yang sebenarnya. Lembaga mukim masih dianggap hanya sebagai lembaga yang hanya mengurus masalah adat dan sengketa antar gampong saja dan tidak terkait dengan pemerintahan. Anggapan semacam ini tentu saja sangat salah, karena pada dasarnya Imum Mukim juga terlibat hal penyelenggaraan pemerintahan. Pembangunan baik yang bersifat fisik maupun non fisik dan pelaksanaan Syariat Islam sebagaimana yang diamanahkan oleh qanum nomor 4 tahun 2003 tentang pemerintahan Mukim dan dalam undang undang pemerintahan Aceh.

Begitu juga dengan Keuchik yang merupakan pimpinan pemerintahan gampong dan menjadi unsur terpenting dalam pelaksanaan pembangunan pemerintahan gampong. Maka dari itu perlu adanya koordinasi yang baik antara Keuchik dengan Imum Mukim agar pembangunan pemerintahan gampong dengan baik dan efektif bermanfaat bagi masyarakat luas. Hal tersebut tentu tidak akan dapat terjadi jika tidak adanya koordinasi dan komunikasi yang baik antara imum dan keuchik gampong. Hubungan yang harmoni dan tidak tumpang tindihnya peran dan tanggung jawab anatar Imum Mukim dan Keuchik menjadi sesuatu yang penting dan suksesnya pembangunan

⁶ Munawar, Tokoh Masyarakat di Aceh Besar, *Wawancara*, Tanggal 29 April 2018.

secara menyeluruh serta menetapkan target pembangunan secara bersama-sama.

Dengan adanya peran Imum mukim di gampong di Aceh, diharapkan proses demokrasi di masyarakat bisa lebih berjalan dengan baik. Masyarakat juga bisa lebih memahami kehidupan berpolitik untuk terus bisa memilih siapa pemimpin yang cocok. Diharapkan bahwa dengan adanya Undang-undang Pemerintahan Aceh, yang kini memungkinkan untuk Aceh kembali ke jati dirinya, bisa menampilkan karakteristik Aceh dan masyarakatnya. Selain itu, keistimewaan dan keunikan Aceh diharapkan bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi warga luar Aceh untuk bisa datang dan melihat Aceh dengan berbagai keunikannya, termasuk keunikan dalam adat dan budaya serta pemerintahan.⁷

Hambatan yang dihadapi Imum Mukim dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintahan gampong di Aceh

Hambatan terbesar yang dihadapi Imum Mukim adalah ketidakpahaman masyarakat akan tugas dan kewenangan Imum Mukim. Sebagian masyarakat masih belum mengetahui tentang peran lembaga mukim ditingkat gampong sehingga mukim masih dianggap tidak memiliki wewenang terhadap pembangunan pemerintahan gampong. Maka sangat diperlukan sosialisasi oleh pihak pemerintah baik itu mukim sendiri, pemerintah kecamatan maupun pemerintah kabupaten. Sosialisasi dapat dilakukan baik berupa seminar, rapat bersama atau diskusi yang akan dihadiri oleh semua unsur masyarakat baik itu petani, nelayan, tokoh perempuan dan juga kalangan pegawai negeri sipil dan melibatkan tokoh masyarakat, ulama dan unsur Muspika Kecamatan Batee Liek serta menghadirkan pemateri baik itu dari kalangan aktivis maupun akademisi yang mengerti tentang lembaga mukim baik itu secara hukum maupun sosial masyarakat.⁸

⁷ Hasbi Wahab, Imum Mukim Aceh Besar, *Wawancara*, Tanggal 29 April 2018.

⁸ Sulaiman Away, Imum Mukim Biren, *Wawancara*, Tanggal 1 Mei 2018.

Selain itu, Imum Mukim Harus Bebas Dari Kepentingan Politik (Penguasa) dalam gampong, kecamatan, Kabupaten maupun Propinsi. Dikarenakan lembaga mukim harus independen dalam hal menentukan sikap politiknya karna jika mukim memihak atau condong pada salah satu partai atau kelompok politik tertentu maka tentu masyarakat akan melihat lembaga mukim tidak lagi sebagai lembaga yang mementingkan kepentingan masyarakat tapi lebih kepada kepentingan partai politik atau kelompok yang bertujuan mendapatkan kekuasaan semata. Hal semacam ini tentu menjadi penghambat peran mukim dalam melakukan pembangunan baik yang bersifat pemerintahan (birokrasi) dan adat maupun pembangunan yang bersifat infrastruktur.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa lembaga mukim adalah lembaga pemerintah resmi di Aceh tentu saja setiap kebijakan yang dilaksanakan harus sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, oleh karena itu setiap kebijakan mukim benar-benar harus bersih dari kepentingan politik sehingga kewibawaan lembaga mukim dalam hal pelaksanaan pembangunan di kemukimannya masing-masing dan juga akan terlibat aktif didalamnya.⁹

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Imum Mukim merupakan lembaga pemerintahan, pemerintahan yang resmi Propinsi Aceh dimana memiliki kewenangan dalam hal mengontrol pembangunan gampung, keterlibatan dalam pembangunan gampung dan melakukan hubungan dalam pembangunan gampung, baik ditingkat kemukiman, gampong dan camat. Meski peran dan fungsi imum mukim dalam hal pelaksanaan pembangunan pemerintahan gampong belum

⁹ Buhari, Tokoh Masyarakat Bireun, *Wawancara*, Tanggal 1 Mei 2018.

begitu maksimal tapi harus diakui bahwa Imum Mukim dan Keuchik merupakan unsur utama dalam hal pembangunan pemerintahan gampong di Aceh. Selain itu dukungan dari semua pihak baik itu pemerintah kecamatan maupun pemerintah kabupaten (eksekutif dan legeslatif) serta lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan tokoh masyarakat sangatlah diperlukan sebagai pihak yang mengawasi dan memberi pendapat terhadap pelaksanaan pembangunan gampong di Aceh.

2. Dalam pelaksanaan pembangunan pemerintahan gampong terdapat hambatan yang terjadi dilapangan, yaitu Ketidaktahuan masyarakat terhadap pentingnya peran imum mukim dalam pembangunan pemerintahan gampong di Aceh. masyarakat masih belum mengetahui tentang peran lembaga mukim ditingkat gampong sehingga mukim masih dianggap tidak memiliki wewenang terhadap pembangunan pemerintahan di gampong. Maka sangat diperlukan sosialisasi oleh pihak pemerintah baik itu mukim sendiri, pemerintah kecamatan maupun pemerintah kabupaten dan harus bebas dari kepentingan Politik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Harley, 2008, Mukim Masa ke Masa Aceh : Jaringan Komunikasi Masyarakat Adat (JKMA), Aceh.
- Hendrawan Sakti, 2011, Koki Skripsi : Resep Cepleng Bikin Skripsi 29 hari ; Araska. Bantul Yogyakarta.
- Jhon W. Creswell, 1998. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Traditions*. Los Angeles: Sage Publications,
- Sanusi M Syarif, 2009. *Gampong dan Mukim di Aceh : Menuju Rekonstruksi Paska Tsunami*. Pustaka Rumpun Bambu.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh
- Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
- Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat
- Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat
- Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Mukim
- Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik